

## BAB II

### HUAWEI DIANTARA ISU ANCAMAN KEAMANAN DAN DAFTAR HITAM AMERIKA SERIKAT

#### 2.1 Isu Penggelapan Dana, Perdagangan Gelap dengan Iran dan Campur Tangan Pemerintah China pada Bisnis Huawei

Sebelum adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, terdapat beberapa alasan yang mendasarinya. Beberapa di antaranya yaitu masalah penggelapan dana yang dilakukan pihak Huawei kepada bank HSBC, menjual perangkat elektronik Amerika Serikat ke Iran secara ilegal, serta tuduhan spionase yang dilakukan pemerintah China melalui perangkat milik Huawei. Pada tahun 2010, terdapat catatan internal yang dipublikasikan oleh Reuters di mana Huawei telah terlibat langsung dalam pengiriman peralatan elektronik komputer ke Iran. Dokumen tersebut menjelaskan adanya rincian mengenai keterlibatan Huawei dalam pelanggaran perdagangan Iran. Pihak Amerika Serikat mendakwa Huawei karena membuat skema penipuan dalam mendapatkan barang dari Amerika Serikat untuk diperjual belikan secara ilegal ke Iran.<sup>1</sup> Surat dakwaan Amerika Serikat menjelaskan bahwa Meng Wanzhou dan pihak Huawei telah secara ilegal menggunakan anak perusahaan tidak resmi yang berbasis di Iran yaitu Skycom untuk mendapat pasokan barang dari Amerika Serikat. Perusahaan Skycom menjual

---

<sup>1</sup> Steve Stecklow, “Exclusive: Newly obtained documents show Huawei role in shipping prohibited U.S. gear to Iran”, diakses dalam <https://www.reuters.com/article/us-huawei-iran-sanctions-exclusive-idUKKBN20P1VA>, (07/02/2023, 20:55 WIB)

peralatan komputer milik perusahaan HP (*Hewlett-Packard*) senilai 1,3 juta euro atau setara dengan 20,2 miliar rupiah dan diembargo kepada penyedia operator seluler di Iran. Hal tersebut dituliskan dalam sebuah dokumen resmi yang memuat logo milik Huawei dan Skycom Iran Office. Dokumen tersebut menjadi bukti Amerika Serikat karena menunjukkan jika Huawei memang mengirim peralatan elektronik buatan Amerika Serikat ke Iran melalui Skycom dan dokumen tersebut memuat 3 bahasa yaitu bahasa China, Inggris, serta Farsi. Kemudian terdapat satu dokumen internal yang memuat tentang permintaan MCI (operator seluler Iran) kepada Huawei untuk memulai proyek perluasan yang ditulis pada 25 September 2010. Dokumen lainnya juga menunjukkan *Bill of Quantity and Quotation* yang berisi mengenai segala keperluan peralatan proyek Huawei seperti perlengkapan perangkat lunak server yang dibuat oleh perusahaan Microsoft, Symantec, Novell, dan *Hewlett-Packard*. Terdapat pula rincian pengiriman barang yang dilakukan Huawei dengan tujuan kota-kota besar di Iran seperti Shiraz, Teheran, serta Masyhad yang berupa perangkat lunak Microsoft, penyimpanan data, sakelar, dan juga perangkat server milik *Hewlett-Packard*. Pihak perusahaan *Hewlett-Packard* dan Huawei sebelumnya telah sepakat jika kontrak keduanya melarang pengiriman atau penjualan barang ke Iran. Keduanya harus mematuhi segala undang-undang internasional maupun peraturan ekspor yang berlaku.<sup>2</sup>

Di tanggal 23 Agustus 2013, Meng Wanzhou melakukan rapat bersama dengan pihak bank HSBC dan memberikan presentasi berbentuk *powerpoint*.

---

<sup>2</sup> Ikmal Muzakkar, "Alasan Amerika Serikat Menangkap Chief Finansial Officer (CFO) Huawei pada tahun 2018", eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.10, No.2, (2022), Samarinda: Universitas Mulawarman, hal 469-470.

Amerika Serikat menuduh Huawei telah melakukan penipuan kepada bank HSBC dalam presentasinya tersebut. Ia menjelaskan hubungan Huawei dengan Skycom yang kemudian menyebabkan HSBC berisiko melanggar sanksi terhadap Iran. Isi dari *powerpoint* tersebut yaitu tentang kesepakatan bisnis telekomunikasi dengan Iran. Di dalam *powerpoint* tersebut disebutkan jika Huawei memiliki kerja sama langsung dengan pihak pemerintah Iran. Sebanyak 17 halaman *powerpoint* tersebut menjelaskan jika aktivitas bisnis Huawei dengan operator Iran hanya sebatas pemasok peralatan telekomunikasi masyarakat serta kerja samanya dengan anak perusahaannya yaitu Skycom yang aman dan terkendali. Skycom sendiri adalah anak perusahaan milik Huawei yang berbasis di Hongkong dan pada bulan November 2007, Skycom memberikan sahamnya ke entitas lain yaitu Canicula Holdings yang dikendalikan juga oleh Huawei. Pada saat itu Skycom di bawah kendali Hua Ying dan Meng Wanzhou masih menjabat sebagai sekretaris di sana. Kemudian di tahun 2008, Meng Wanzhou bergabung dengan direksi Skycom hingga bulan April 2009. Pada tahun 2012 Huawei mendaftarkan Skycom untuk menjadi anak perusahaan Huawei di dalam dokumen resminya. Di tahun 2010 dan 2014 operasi Skycom di bawah kendali Huawei. Oleh sebab itu, segala keputusan bisnis Skycom dibuat oleh Huawei. Di akhir tahun 2012 dan awal 2013 dilaporkan jika Skycom memberikan penawaran untuk menjual barang yang diembargo Amerika Serikat ke Iran. Huawei menyebut jika Skycom telah menjadi mitra lokal utama di Iran tetapi sebenarnya operasi bisnis Skycom berada di tangan Huawei dan dakwaan Amerika Serikat menyebutkan bahwa Skycom adalah anak perusahaan tidak resmi milik Huawei dan bukanlah mitra lokal. Huawei juga

mengakui dan mengetahui adanya larangan Amerika Serikat untuk tidak meneliti, memproduksi, mengembangkan, maupun menjual produk apa pun untuk keperluan militer. Penjualan dan layanan yang diberikan Huawei kepada Iran hanya sebatas bisnis operator telekomunikasi yang sama halnya dengan kerja sama di negara lainnya.<sup>3</sup>

Presentasi dan *powerpoint* yang dibuat Huawei kemudian dijadikan kunci Amerika Serikat atas tuduhannya kepada Meng Wanzhou dalam melakukan penipuan. Selain itu Huawei juga menyatakan jika telah melepaskan kepentingannya di Skycom. Pemerintah Amerika Serikat berpendapat jika presentasi tersebut adalah bentuk penipuan agar Huawei dapat menghindari sanksi internasional Iran yang telah dibuat Amerika Serikat dan Uni Eropa senilai ratusan juta dolar. Namun penjelasan inti dari presentasinya yaitu berpusat pada hubungan kerja sama antara Huawei dengan perusahaan Skycom asal Hongkong di mana perusahaan tersebut terhubung langsung dengan Iran. Huawei terbukti telah secara sengaja berbisnis dengan Skycom tanpa sepengetahuan bank HSBC yang kemudian hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sanksi. Adanya presentasi tersebut memungkinkan Huawei untuk memindahkan dana dari Iran maupun negara lainnya yang terdampak sanksi internasional melalui berbagai bank yang ada. Salah satunya yaitu bank HSBC yang merupakan Lembaga Keuangan 1 dengan transfer senilai ratusan juta dolar. Meng Wanzhou tidak dapat membuktikan yang sebenarnya mengenai operasi bisnis Huawei di Iran sehingga menurut Amerika Serikat, pengakuan Meng Wanzhou menjadi bukti adanya penipuan yang melanggar hukum

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 470.

Amerika Serikat. Akhirnya Meng Wanzhou menyetujui dan mengakui pernyataan yang diberikan Amerika Serikat pada persidangan terkait rincian pernyataan palsu yang telah dibuatnya. Pemerintah sepakat untuk menarik permintaannya ke Departemen Kehakiman Kanada untuk dipindahkan dan diproses ke Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Huawei menjadi sebuah ancaman bagi Amerika Serikat terkait keamanan produknya. Amerika Serikat menyebut China sebagai pesaing, penantang dan kekuatan revisionis dalam laporan pertama yang dibuat oleh presiden Donald Trump yaitu *National Security Strategy* tahun 2017. Sebelumnya pada tahun 2008, Amerika Serikat juga melarang Huawei untuk mengakuisisi perusahaan 3Com yang merupakan bagian dari divisi nirkabel Motorola dan di tahun 2010 Huawei dikeluarkan dari kontrak telekomunikasi atas dasar masalah keamanan. Menurut Plummer hal tersebut adalah bentuk dari model tekno-nasionalisme modern yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Model tersebut selalu didasarkan pada keamanan nasional yang tidak pernah dibuktikan dan atas dasar kemungkinan yang akan terjadi sehingga menyebabkan adanya hambatan akses pasar dan tidak jelas bagi perusahaan multinasional seperti Huawei. HPSCI (*the US House of Representatives Permanent Select Committee on Intelligence*) atau Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melakukan penyelidikan khusus terkait adanya ancaman keamanan nasional yang dilakukan oleh Huawei selaku perusahaan asal China yang bekerja di Amerika Serikat pada tahun 2011. Menurutnya, Huawei dituduh sebagai risiko keamanan bagi kepentingan Amerika Serikat yang akan mengancam

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 472

kekayaan intelektual serta menimbulkan penyalahgunaan privasi penggunanya. Kemudian pada dokumen *Strategic Partnership Intelligence Note* yang dibuat oleh FBI di tahun 2015 menjelaskan inisiatif pemerintah dalam mendistorsi pasar global serta memberi batasan terhadap persaingan terbuka atas dasar keamanan nasional. Ketidakpercayaan strategis tercermin dalam hubungan bilateral yang semakin memburuk dan telah melibatkan kepentingan maupun keamanan nasional. Pihak NATO yang dalam hal ini CCDCOE atau *Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence* melaporkan mengenai Huawei dan teknologi 5G-nya serta China sebagai ancaman keamanan. NATO sedang menyelidiki apakah kemitraan itu menimbulkan risiko nyata, atau apakah mereka hanya khawatir teknologi 5G Huawei akan menciptakan ketergantungan pada peralatan yang kemungkinan dapat dikendalikan oleh dinas intelijen atau militer China di masa damai maupun krisis. Menghilangkan risiko kontrol tersebut dengan negara musuh akan menghapus produk milik China terhadap rantai pasokan. Hal tersebut menjelaskan jika China diartikan sebagai negara musuh atau aktor jahat bagi Amerika Serikat.<sup>5</sup> Terlebih lagi menurut Amerika Serikat, hubungan aktor bisnis China dengan pemerintah China bukan seperti hubungan antar aktor swasta dengan pemerintahan Barat sehingga pemerintah bersifat otoriter dan memudarnya batas antara bisnis independen dengan negara. Hal tersebut ada pada Undang-undang Intelijen Nasional China tahun 2017 yang menjelaskan tentang perusahaan China harus mendukung, memberi bantuan, serta bekerja sama untuk kepentingan intelijen

---

<sup>5</sup> Xin Liu, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

nasional negara di mana pun perusahaan tersebut berjalan.<sup>6</sup> Risiko kerja sama hanya sebatas kemungkinan dan tidak nyata. Saat ini tidak ada bukti nyata mengenai keamanan 5G ataupun produk Huawei namun Amerika Serikat tetap menetapkan larangan dan sanksi terhadap Huawei. Menurut Huawei, membatasi persaingan yang adil dan merugikan konsumen Amerika Serikat tidak ada gunanya karena bukan tentang keunggulan produk tetapi identitasnya sebagai perusahaan China yang tidak dapat diubah dan dianggap Amerika Serikat sebagai pesaing.<sup>7</sup>

Klaim Amerika Serikat mengenai isu perusahaan Huawei didasarkan pada beberapa hal, antara lain :

a. Hubungan Huawei dengan pemerintah China :

Huawei adalah perusahaan teknologi China yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah China. Amerika Serikat dan negara-negara lainnya khawatir bahwa Huawei dapat dipaksa oleh pemerintah China untuk memasukkan *back-door* atau fitur keamanan lainnya ke dalam produk-produknya untuk memungkinkan pemerintah China untuk memata-matai pengguna. Pemerintah dinilai memiliki pengaruh besar bagi perusahaan-perusahaan yang berdiri dinegaranya dengan peraturan yang ketat dan salah satunya agar dapat mendirikan cabang-cabang hingga diberikannya investasi yang didukung langsung oleh negara. Pendiri Alibaba Group yaitu Jack Ma dan pendiri Huawei Ren Zhengfei dulunya sempat menjabat sebagai insinyur Tentara Pembebasan Rakyat yang mana

---

<sup>6</sup> Roy Franedy, “Ini Alasan Trump Bersikap Galak ke Huawei”, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190219124132-37-56359/ini-alasan-trump-bersikap-galak-ke-huawei>, (08/02/2023, 21:03 WIB)

<sup>7</sup> Xin Liu, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

merupakan bagian dari anggota partai. Batasan antara swasta dan publik China di bawah kepemimpinan Xi Jinping menjadi kabur. Menurut pengamatan ahli, ada upaya yang dilakukan oleh partai komunis China dalam meningkatkan pengaruh bagi perusahaan teknologi swasta.<sup>8</sup>

b. Kebijakan dan Peraturan China :

Amerika Serikat khawatir dengan adanya campur tangan pemerintah China dalam bisnis sebuah perusahaan terutama Huawei. Adanya kebijakan dan peraturan yang dibuat dikhawatirkan digunakan pemerintah China untuk memata-matai pengguna perangkat Huawei. Peraturan tersebut ditulis oleh *National Intelligence Law of the Peoples Republic of China* pada tahun 2017 yang salah satu isinya tertulis:

*“All state organs, armed forces, political parties, social groups, enterprises, public institutions, organizations and citizens, shall support, assist and cooperate with national intelligence efforts, and protect national intelligence work secrets they are aware of.”*<sup>9</sup>

c. Kasus pelanggaran keamanan :

Menurut seorang pejabat tinggi di Gedung Putih Washington, Huawei diam-diam menggunakan perangkatnya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan jaringan nirkabel generasi 5G-nya dan sistem

---

<sup>8</sup> Noah Berman, Lindsay Maizland, Andrew Chatzky, “*Is China’s Huawei a Threat to U.S. National Security*”, diakses dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-huawei-threat-us-national-security>, (15/10/2023, 16:55 WIB)

<sup>9</sup> China Law Translate, “*National Intelligence Law of the People’s Republic of China*”, diakses dalam <https://www.chinalawtranslate.com/en/national-intelligence-law-of-the-peoples-republic-of-china-draft/#explanation>, (08/10/2023, 18:32 WIB)



yang dikelolanya di seluruh dunia. Menurut pejabat intelijen Amerika Serikat juga mengatakan bahwa Huawei memiliki *back-door* atau celah keamanan pada produknya yang memungkinkan Huawei untuk mendapatkan data penggunanya melalui jaringan yang telah mereka buat sebelumnya. Beberapa operator seluler memiliki caranya sendiri dalam memberikan akses jaringan, namun Huawei tetap dapat memiliki akses langsung dari adanya *back-door* tersebut tanpa harus mendapat izin dari penyedia operator, terlebih jaringan 5G yang dibangun merupakan milik Huawei. Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat telah menyusup pada sistem perangkat Huawei dalam operasi rahasia bernama kode ‘Shotgiant’ dengan tujuan untuk menentukan adakah campur tangan dari Tentara Pembebasan Rakyat dibalik *back-door* tersebut. Mengingat pendiri Huawei merupakan mantan Tentara Pembebasan Rakyat. Tetapi pada 2014, operasi rahasia tersebut bocor akibat dari ulah mantan kontraktor Edward J. Snowden.<sup>10</sup>

## **2.2 Blacklist Pemerintah Amerika Serikat**

Regulasi Amerika Serikat terhadap Huawei tertulis pada beberapa dokumen berupa undang-undang, dakwaan, dan perintah eksekutif presiden, diantaranya adalah :

- a. Sanksi Huawei Tertulis pada Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat

---

<sup>10</sup> Julian E. Barnes, “*White House Official Says Huawei Has Secret Back Door to Extract Data*”, diakses dalam <https://www.nytimes.com/2020/02/11/us/politics/white-house-huawei-back-door.html>, (08/10/2023, 19:32 WIB)

Huawei dan perusahaan-perusahaan tertentu diluar Amerika Serikat dimasukkan ke dalam daftar entitas di bawah Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2019 hingga pembaruan terakhir pada tanggal 20 Agustus 2020. Dimasukkannya Huawei ke dalam daftar entitas berdasarkan IEEPA (*International Emergency Economic Powers Act*) atau Undang-Undang kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. IEEPA sendiri adalah undang-undang Amerika Serikat yang memberikan kewenangan pemimpin negara untuk mengatur perdagangan dan keuangan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang mengancam. Kemudian Amerika Serikat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh IEEPA untuk memasukkan Huawei ke daftar entitas karena menganggap Huawei sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Dokumen tersebut berisi mengenai aturan dengan total sebanyak 34 halaman. Tujuannya yaitu untuk mengurangi dan mengatasi adanya dampak ancaman berkelanjutan bagi keamanan nasional Amerika Serikat serta kepentingan kebijakan luar negerinya. Afiliasi non Huawei juga dimasukkan ke daftar entitas karena dikhawatirkan akan berdampak di kemudian hari. Amerika Serikat juga menghapus lisensi dagang milik Huawei sehingga membuatnya sangat terbatas untuk berbisnis sebagai bagian dari cara untuk melindungi keamanan nasional serta kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dengan dimasukkannya Huawei pada entitas, maka segala jenis ekspor, ekspor ulang, maupun transfer barang apapun dalam negeri harus tunduk pada EAR (*Export Administration Regulations*) atau peraturan

administrasi ekspor yang mana membutuhkan lisensi untuk dapat melakukannya.<sup>11</sup>

b. *Defending America's 5G Future Act* atau Undang-Undang Masa Depan 5G Amerika Serikat

Amerika Serikat membuat undang-undang mengenai jaringan 5G-nya sendiri melalui senat komite perbankan, perumahan, dan urusan tata perkotaan. Undang-undang tersebut ditulis pada kongres ke-116 S.2118 yang dipublikasikan pada tanggal 7 Juli 2019. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut agar orang Amerika Serikat tidak lagi berurusan maupun menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berasal dari musuh asing yang dalam hal ini adalah Huawei. Istilah 'orang Amerika Serikat' disini mencakup setiap warga negara Amerika Serikat atau orang asing yang secara sah tinggal permanen di Amerika Serikat, setiap entitas yang diatur berdasarkan hukum atau yuridiksi, serta pejabat tinggi di Amerika Serikat. Diperlukan adanya persetujuan untuk mengakhiri kontrol ekspor dan penggunaan barang melalui kongres. Isi dari undang-undang tersebut kurang lebih mengenai larangan bagi masyarakat serta pejabat tinggi Amerika Serikat untuk mengakuisisi, mengimpor, mentransfer, melakukan instalasi, bertransaksi hingga menggunakan teknologi atau layanan informasi milik produk asing yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat. Apabila terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan maka akan ditindak

---

<sup>11</sup> Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, *Addition of Huawei Non-U.S. Affiliates to the Entity List, the Removal of Temporary General License, and Amendments to General Prohibition Three (Foreign-Produced Direct Product Rule)*, Vol. 85, No. 162 (August 2020), Rules and Regulations

tegas melalui penalti yang telah disesuaikan berdasarkan IEEPA. Isi dari undang-undang tersebut juga membahas mengenai menteri perdagangan yang tidak akan menghapus Huawei dan afiliasi lainnya pada aturan tambahan nomor 4 pasal 744 yang tertulis pada peraturan administrasi ekspor.<sup>12</sup>

c. Dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Distrik Barat dan Timur)

Berikut adalah 13 daftar lengkap dari dakwaan yang ditulis pada pengadilan distrik wilayah timur, New York, antara lain :<sup>13</sup>

- 1) (1) dan (2) Konspirasi dalam melakukan penipuan bank : Huawei, Skycom Tech Company, dan Meng Wanzhou diduga bersekongkol dalam menipu *US Subsidiary 1* pada November 2007 hingga Mei 2015. Meng Wanzhou diduga melakukan misrepresentasi yang dilakukan ke dalam presentasi bentuk PowerPoint di tahun 2013 mengenai hubungan antara Huawei dengan Skycom sebagai rekan bisnis dan mengacu pada transaksi lembaga keuangan yang disebut oleh *US Subsidiary 4*.
- 2) (3) Konspirasi dalam melakukan penipuan telegram atau penipuan surat elektronik : Huawei, Skycom dan juga Meng Wanzhou pada jangka waktu November 2007 hingga Mei 2015 diduga

---

<sup>12</sup> Authenticated U.S. Government Information, “S.2118 - Defending America’s 5G Future Act”, 116th Congress (2019)

<sup>13</sup> Tripti Lahiri, “The full list of crimes the US accuses Huawei of committing”, diakses dalam <https://qz.com/1535995/the-full-list-of-crimes-huawei-is-accused-of-committing-by-the-us/>, (16/09/2022, 21:12 WIB)

bersekongkol untuk menipu 4 lembaga keuangan melalui komunikasi surat elektronik.

- 3) (4) Penipuan bank : Huawei, Skycom, dan Meng Wanzhou diduga memperoleh dana penyimpanan *US Subsidiary 1* (Bank HSBC) dengan pernyataan palsu pada jangka waktu November 2007 hingga Mei 2015.
- 4) (5) Penipuan bank : Huawei dan terdakwa anonim diduga memperoleh dana penyimpanan *US Subsidiary 4* dengan pernyataan palsu antara bulan Agustus 2017 hingga saat ini.
- 5) (6) Penipuan telegram atau penipuan surat elektronik : Huawei, Skycom, Meng Wanzhou dan pihak lainnya diduga telah membuat pernyataan palsu yang dikirim melalui email mengenai hubungan bilateral antara Huawei dan Skycom serta ketaatannya kepada peraturan Amerika Serikat sehingga menyebabkan adanya korban lembaga keuangan milik Amerika Serikat. Terjadi sekitar bulan November 2007 hingga Mei 2015.
- 6) (7) Konspirasi untuk menipu Amerika Serikat : Huawei, Skycom, dan pihak lainnya diduga telah menghalangi OFAC atau *Office of Foreign Assets Control* atau Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri dalam menjalankan tugasnya untuk memberlakukan undang-undang sanksi Amerika Serikat dengan tindakan curang pada sekitar bulan Juli 2007 hingga sekarang. Tuduhan tersebut merujuk pada “Individu 1” yang dimaksudkan adalah pendiri Huawei dengan

memberi tahu kepada agen FBI jika tidak ada aktivitas Huawei dalam bentuk apa pun yang melanggar aturan termasuk hubungan langsung dengan perusahaan Iran. Penyangkalan tersebut disertai dengan kesaksian wakil presiden senior Huawei kepada kongres Amerika Serikat jika bisnis Huawei di Iran tidak melanggar aturan atau regulasi apa pun.

- 7) (8) Konspirasi dalam melanggar (*International Emergency Economic Powers Act*) atau Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional : IEEPA dibentuk dengan tujuan untuk memberi wewenang kepada presiden dalam mengatasi adanya ancaman darurat terhadap kebijakan luar negeri, keamanan nasional, maupun perekonomian Amerika Serikat. Huawei, Skycom, dan pihak lainnya diduga berkonspirasi memasok layanan keuangan Amerika Serikat ke Iran tanpa izin yang terjadi pada November 2007 dan November 2014 sehingga Amerika Serikat menyatakan Iran sebagai ancaman.
- 8) (9) Pelanggaran IEEPA : Terjadi sekitar bulan November 2007 dan November 2014 di mana Huawei, Skycom, dan pihak lainnya diduga melakukan ekspor layanan keuangan Amerika Serikat ke Iran tanpa mendapat lisensi dari OFAC.
- 9) (10) Konspirasi untuk melanggar IEEPA : Huawei, Skycom, dan pihak lainnya diduga melakukan ekspor layanan telekomunikasi

yang disediakan oleh warga Amerika Serikat ke Iran tanpa adanya izin dari OFAC antara tahun 2008 dan 2014.

10) (11) Pelanggaran IEEPA : Terjadi antara tahun 2008 dan 2014 di mana Huawei, Skycom, dan pihak lainnya diduga melakukan ekspor layanan telekomunikasi yang disediakan oleh warga negara Amerika Serikat ke Iran tanpa izin dari OFAC.

11) (12) Konspirasi pencucian uang : Huawei, Skycom, dan pihak lainnya pada bulan November 2007 dan November 2014 bersekongkol untuk melakukan transfer telegram antara Amerika Serikat dengan tempat lain yang melanggar hukum.

12) (13) Konspirasi dalam menghalangi keadilan : Huawei dan Huawei Amerika Serikat diduga bersekongkol dalam menghalangi penyelidikan dewan juri federal Distrik Timur New York dengan memindahkan saksi terkait transaksi Iran ke China serta diduga telah menghancurkan dan menyembunyikan barang bukti mengenai bisnis Iran pada Januari 2017 hingga sekarang.

Sementara itu, isi dari 10 dakwaan distrik wilayah barat bagian Washington adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1) (1) Konspirasi pencurian rahasia dagang : Huawei dengan Huawei Amerika Serikat diduga bersekongkol dalam mencuri data dan membocorkan rahasia dagang milik T-Mobile yang berbasis di Bellevue (kota di Washington) mengenai *Tappy* yang merupakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

sistem robot telepon. Kejadian tersebut berlangsung antara Juni 2012 dan September 2014. Huawei mengajukan pertanyaan rinci kepada insinyur T-Mobile mengenai spesifikasi, mengambil foto robot secara ilegal, mendapatkan akses tidak sah untuk insinyur Huawei dari kantor China ke laboratorium milik T-Mobile di Amerika Serikat. Kemudian Huawei dinilai telah mencuri lengan robot atas arahan langsung dari Huawei China. Sebenarnya, Huawei telah memiliki perjanjian kerja sama dengan T-Mobile untuk memasok ponsel buatan mereka dan para insinyurnya yang berbasis di Amerika sehingga memiliki akses fasilitas T-Mobile dalam melakukan pengujian. Surat dakwaan yang dibuat juga menuduh bahwa Huawei berusaha membelokkan atau menyesatkan T-Mobile dengan mengatakan para insinyur di Amerika Serikat mengambil tindakan yang tidak pantas sementara saat itu Huawei sedang memiliki program bonus bagi karyawan yang memberi informasi rahasia dari perusahaan lain melalui situs web internal khusus mereka.

- 2) (2) Percobaan pencurian rahasia dagang.
- 3) (3) sampai (9) Penipuan telegram atau surat kawat : Karyawan Huawei diduga telah mengirimkan 7 pesan berisi rencana penipuan rahasia dagang milik T-Mobile.
- 4) (10) Hambatan keadilan : Huawei diduga berusaha menghalangi serta mempengaruhi kasus perdata yang dibawa oleh T-Mobile



terhadap Huawei dan sidang dewan juri di Washington pada bulan Juni 2013 dan September 2014.

d. *National Defense Authorization Act* (NDAA) atau Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional bagian 889 mengatur mengenai larangan bagi lembaga federal Amerika Serikat, kontraktor, dan penerima hibah untuk mendapatkan atau menggunakan peralatan layanan informasi dan teknologi tertentu yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Undang-undang tersebut berupaya untuk mengurangi adanya risiko penyalahgunaan privasi dan keamanan yang dapat merugikan Amerika Serikat. Larangan tersebut tertulis pada pasal :

- 1) Pasal 889 (a)(1)(A) : melarang agen federal membeli peralatan dan layanan telekomunikasi terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2019. Agen federal tersebut termasuk *General Services Administration* atau Badan Administrasi Umum, *The US Department of Defense* atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan *National Aeronautics and Space Administration* atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, dan lain sebagainya.
- 2) Pasal (889 (a)(1)(B) : melarang agen federal memasuki, memperpanjang dan memperbarui kontrak dengan perusahaan yang menggunakan peralatan dan layanan telekomunikasi tertutup terhitung sejak 13 Agustus 2020 dengan cakupan lebih luas dari fase pertama. Adanya pasal tersebut ditujukan agar pemerintah Amerika

Serikat tidak terikat dan melakukan bisnis dengan perusahaan yang menggunakan peralatan serta layanan telekomunikasi tertutup.

Yang dimaksud dengan ‘peralatan dan layanan telekomunikasi’ pada pasal tersebut yaitu segala peralatan telekomunikasi yang diproduksi oleh Huawei dan ZTE serta anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan tersebut.<sup>15</sup>

e. Perintah Eksekutif tentang melindungi data sensitif Amerika Serikat dari musuh asing (*Executive Order on Protecting Americans’ Sensitive Data from Foreign Adversaries*)

Perintah eksekutif mengenai perlindungan data sensitif Amerika Serikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2021 oleh Presiden Joe Biden. Perintah tersebut dirancang agar melindungi data sensitif dari musuh asing termasuk Huawei. Perintah tersebut mengarahkan Menteri Perdagangan agar mengidentifikasi dan menilai aplikasi pada perangkat keras yang dirancang, diproduksi, dikembangkan dan dipasok oleh perusahaan yang tunduk pada aturan atau arahan musuh asing. Menteri perdagangan kemudian diberi wewenang dalam mengambil langkah untuk mencegah adanya pencurian data sensitif tersebut. Perintah Joe Biden merupakan bentuk dari perintah eksekutif baru yang sebelumnya sudah dibuat oleh Presiden Donald Trump yang hanya menargetkan perusahaan tertentu seperti Huawei dan TikTok, sehingga kini cakupannya lebih luas

---

<sup>15</sup> Stevevi, *National Defense Authorization Act (NDAA)*, diakses dalam <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/compliance/offerings/offering-ndaa-section-889>, (09/10/2023, 16:43 WIB)

lagi dengan menargetkan semua aplikasi dan produk yang berasal dari musuh asing. Pemerintah federal harus mengevaluasi ancaman-ancaman melalui analisis berbasis bukti yang kuat demi menjamin keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi termasuk kebebasan fundamental Amerika Serikat. Amerika Serikat akan memberlakukan konsekuensi kepada orang-orang yang tidak tunduk sesuai dengan larangan yang telah dijelaskan.<sup>16</sup>

Dampak dari dimasukkannya Huawei ke dalam daftar entitas Amerika Serikat berpengaruh pada pemberlakuan persyaratan lisensi yang terdaftar dalam EAR atau *Export Administration Regulations* sehingga segala bentuk bisnis perdagangan harus tunduk terhadap EAR dengan segala persyaratan lisensi yang ada. Aktivitas bisnis internasional seperti ekspor, ekspor ulang maupun transfer dalam negeri akan menjadi terhambat karena memerlukan lisensi kecuali aktivitas tersebut telah diizinkan sesuai dengan ketentuan khusus daftar entitas dari pemerintah Amerika Serikat langsung. Konsumen tidak dapat mengembalikan produk atau ponsel mereka ke Huawei tanpa adanya izin dari BIS bahkan untuk kegiatan reparasi atau perbaikan produk.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Joseph R. Biden JR, “*Executive Order on Protecting Americans’ Sensitive Data from Foreign Adversaries*”, U.S. Executive Order, diakses dalam <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/09/executive-order-on-protecting-americans-sensitive-data-from-foreign-adversaries/>, (09/10/2023, 17:38)

<sup>17</sup> Bureau of Industry and Security U.S. Department of Commerce, “*Entity List Additions of Huawei and 68 non-US Affiliates in Effect*”, <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2395-effective-date-of-huawei-and-affiliates-entity-list-rule> (14/09/2022, 21:43 WIB)

Pemasok atau produsen non Amerika di berbagai penjuru dunia tidak dapat menjual produknya ke Huawei apabila produknya mengandung barang dari Amerika Serikat kecuali mendapat persetujuan langsung dari pemerintah Amerika Serikat. Produk tersebut di antaranya lensa kamera, layar, papan sirkuit (PCB), dan juga *chip* atau semikonduktor. Sebelum adanya keputusan sanksi, Huawei telah mendapatkan pasokan *chip* penuh dari Amerika Serikat yang dapat digunakan kurang lebih selama 6 bulan namun itu hanya dapat bertahan dalam jangka pendek saja. China telah mengimpor sebanyak 445 miliar *chip* dari Amerika Serikat di tahun 2019 yang melampaui minyak mentah sebagai produk impor terbanyak di China. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Huawei dan China memiliki ketergantungan akan impor semikonduktor dari negara lain.<sup>18</sup> Agar Huawei mendapat pasokan *chip* maka diperlukan adanya lisensi khusus dari *U.S. Department of Commerce* atau Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut membuat perusahaan *chip* Qualcomm berhenti memasok barang ke Huawei. Huawei juga memiliki *chip* sendiri yang dinamakan Kirin dan diproduksi bersama anak perusahaannya yaitu HiSilicon. Tetapi produksi Kirin juga terhenti akibat penggunaan bahan baku yang didapat dari Amerika Serikat tidak lagi dikirim.<sup>19</sup> Di tahun 2020, Qualcomm diberikan izin oleh Amerika Serikat untuk menjual produknya

---

<sup>18</sup> Zheng Junfeng, Zhu Feng, “*Can Huawei survive the U.S. chip ban?*”, diakses dalam <https://news.cgtn.com/news/2020-09-16/Can-Huawei-survive-the-U-S-chip-ban--TPVMNJdWq4/index.html>, (08/11/2022, 14:11 WIB)

<sup>19</sup> Roy Franedy, “*Qualcomm Dikabarkan Pasok Chip HP ke Huawei, Trump Melunak?*”, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201113161238-37-201708/qualcomm-dikabarkan-pasok-chip-hp-ke-huawei-trump-melunak>, (08/11/2022, 14.25 WIB)

kepada Huawei tetapi dengan syarat harus menjual anak perusahaannya yaitu Honor karena menurut Qualcomm akan sulit memenuhi kapasitas produksi keduanya.<sup>20</sup> Namun di tahun 2021 setelah lepas dari Huawei, Honor tetap mendapat pasokan *chip* dari Qualcomm.

Salah satu produk ponsel pintar milik Huawei dengan seri Honor dijual kepada perusahaan Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Honor awalnya dibuat Huawei untuk dapat bersaing dengan merek yang lain namun dengan spesifikasi dan fitur yang mumpuni dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan menjual Honor maka akan mendapat hak akses penuh dari Amerika Serikat karena tidak terikat lagi dengan sanksi Huawei. Di tahun 2021 Honor merilis ponsel pintar pertamanya dengan bekerja sama kembali dengan Google dan juga Qualcomm yang dijual di 40 negara kecuali Amerika Serikat.<sup>21</sup> Bukan berarti Honor akan terbebas dari daftar hitam Amerika Serikat karena presiden Joe Biden akan terus memberi pengawasan terhadap Honor. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat dengan tujuan memastikan bahwa Honor benar-benar lepas dari campur tangan Huawei. Terdapat 4 agensi Amerika Serikat yang memiliki perbedaan pendapat mengenai keamanan Honor di pasar Amerika Serikat dan perlukah untuk dimasukkan ke dalam daftar entitas seperti Huawei. Dua di antaranya yaitu Departemen

---

<sup>20</sup> CNN Indonesia, “*Huawei Tak Lagi Miliki Honor, Dijual Akibat Sanksi AS*”, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201118071010-185-571122/huawei-tak-lagi-miliki-honor-dijual-akibat-sanksi-as>, (08/11/2022, 15:01 WIB)

<sup>21</sup> Novina Putri Bestari, “*Cerai dari Huawei, Honor Rilis HP Global Pakai Android*”, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211027153137-37-286968/cerai-dari-huawei-honor-rilis-hp-global-pakai-android>, (08/11/2022, 16:05 WIB)

Pertahanan Pentagon di Washington dan Departemen Energi (departemen eksekutif federal pemerintah) yang sepakat jika Honor dimasukkan ke dalam daftar entitas. Sebelumnya, Sekretaris Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Joe Biden mengenai kekhawatiran apabila produk Honor bekerja sama kembali dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Beberapa anggota DPR Partai Republik Amerika Serikat (*Grand Old Party*) juga sepakat mengenai daftar entitas tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Honor akan menjadi seperti Huawei di masa yang akan datang.<sup>22</sup>

Perusahaan Google Amerika Serikat resmi mencabut lisensi android yang sebelumnya terdapat di seluruh ponsel pintar milik Huawei pada tanggal 19 Mei 2019. Lisensi dari Google sangat penting bagi Huawei agar perangkat pintarnya bisa bersaing dengan merek lainnya. Lisensi tersebut mencakup sistem operasi milik Google yaitu android, layanan Google seperti toko aplikasi *Google Play Store*, layanan *email* yaitu Gmail, layanan antarmuka pemrograman *Google Mobile Services* dan masih banyak lagi. Sehingga perangkat Huawei tidak mendapat akses penuh seperti pada perangkat pintar merek lainnya. *Google Play Store* digunakan untuk mencari, memilih, dan memasang aplikasi yang dibutuhkan pengguna. Gmail digunakan bukan hanya sekedar alat mengirim *email* saja tetapi juga menjadi aplikasi penting untuk dapat masuk ke dalam aplikasi sehingga

---

<sup>22</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Setelah Huawei, Pemerintah AS Incar Honor untuk Di-blacklist”, diakses dalam <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/23/11020007/setelah-huawei-pemerintah-as-incar-honor-untuk-di-blacklist?page=all>, (08/11/2022, 16:17 WIB)

dapat disimpulkan bahwa elemen Google akan saling terhubung. Pengembang aplikasi pun bergantung pada platform Google Play agar lebih mudah diakses penggunanya. Seluruh ponsel pintar akan sangat bergantung pada ekosistem Google tak terkecuali produk milik Apple yang bahkan tidak menggunakan sistem operasi android milik Google. Android telah menjadi standar secara *de facto* bagi ponsel pintar, seperti halnya sistem operasi Microsoft pada PC (*Personal Computer*). Meskipun Android mengadopsi sistem terbuka (*open source*) yang membantu para *developer* atau pengembang aplikasi dengan bebas mempublikasikan aplikasinya tetapi Google masih tetap memiliki kendali penuh atas aplikasi yang beredar dan memutuskan perusahaan apa saja yang dapat memiliki akses ke sistemnya.<sup>23</sup>

Cabang *research and development* milik Huawei yaitu Futurewei Technologies, Inc yang berlokasi di Amerika Serikat memutuskan untuk memisahkan diri semenjak adanya sanksi yang menimpa Huawei.<sup>24</sup> Futurewei mempekerjakan ratusan karyawan yang berada di Chicago, Dallas, serta Seattle. Terdapat 2100 paten miliknya di bidang telekomunikasi, teknologi seperti video dan kamera, serta jaringan seluler 5G. Pihak Futurewei melarang karyawan Huawei untuk bekerja lagi di sana, memindahkan karyawan Futurewei ke sistem teknologi informasi baru serta

---

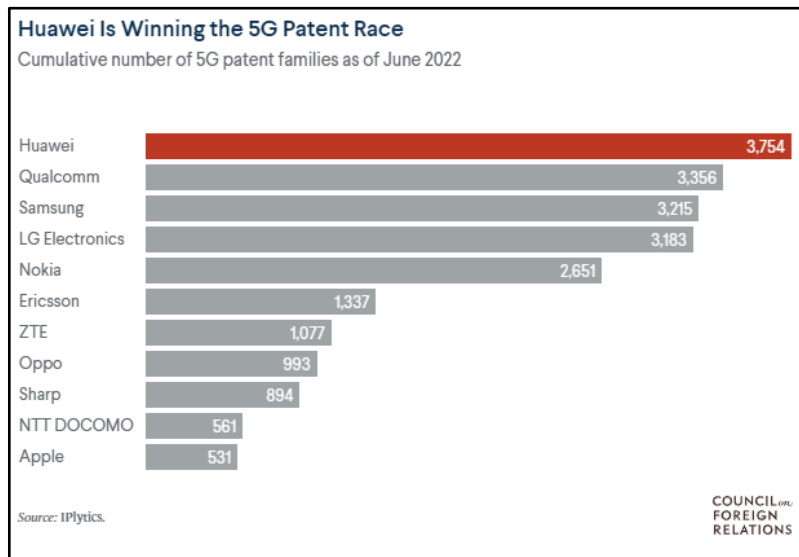
<sup>23</sup> Xiaobai Shen, "Google's withdrawal from Huawei mobile phones: tech or Trump?", diakses dalam [https://www.researchgate.net/publication/333867019\\_Google%27s\\_withdrawal\\_from\\_Huawei\\_mobile\\_phones\\_tech\\_or\\_Trump](https://www.researchgate.net/publication/333867019_Google%27s_withdrawal_from_Huawei_mobile_phones_tech_or_Trump), (10/11/2022, 15:50 WIB)

<sup>24</sup> Jane Lanhee Lee, "Exclusive: Huawei's U.S. research arm builds separate identity", diakses dalam <https://jp.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-university-exclusive-idUSKCN1TP2DL>, (05/1/2023, 14:44 WIB)

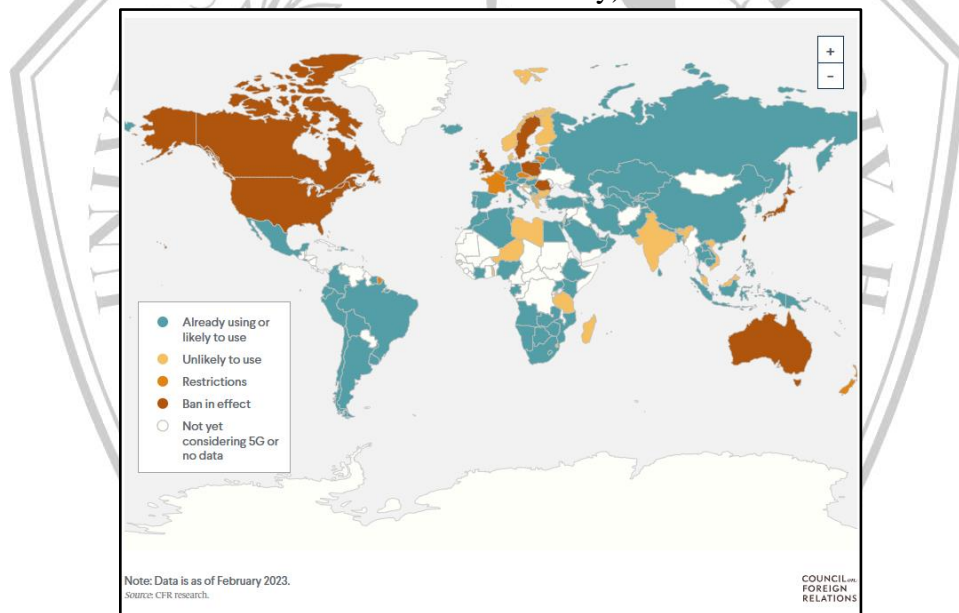
tidak diperbolehkan lagi menggunakan nama atau logo yang mengandung hak cipta Huawei. Universitas-universitas di Amerika Serikat juga telah menghentikan kemitraan dengan Huawei sebagai reaksi dari rezim Donald Trump karena kemungkinan akan menyebabkan adanya ancaman keamanan nasional. Bukan hanya Huawei, universitas juga memikirkan kembali kemitraan mereka dengan perusahaan asal China lainnya. Baik Huawei dan juga Futurewei sebelumnya telah menjalankan kerja sama berupa program hibah dengan setidaknya 50 universitas di Amerika Serikat. Pada tahun 2018 sebanyak 26 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat ajuan kepada Menteri Pendidikan saat itu yaitu Betsy DeVos dengan maksud untuk memperingatkan bahwa kemitraan antara 50 universitas Amerika Serikat dengan Huawei akan berdampak buruk karena dapat mengancam keamanan nasional. Beberapa universitas yang bermitra dengan Huawei di antaranya adalah universitas Berkeley, Princeton, Stanford, Columbia, Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Texas di Austin, Universitas Michigan, dan lainnya. Menurutnya, Huawei kemungkinan menggunakan kemitraan universitas dalam mendapatkan penelitian di bidang AI atau kecerdasan buatan yang kini sedang berkembang, robotika, serta teknologi komunikasi melalui kegiatan mata-mata maupun peretasan yang kemudian memberikan perusahaan China sebuah keunggulan. Departemen Perdagangan Amerika Serikat tidak dapat secara legal memasukkan Futurewei ke dalam daftar entitas karena Futurewei adalah perusahaan asal Amerika Serikat terlepas dari kepemilikan cabang dengan Huawei. Salah



satu anggota kongres memperkenalkan rancangan undang-undang yaitu *Protect Our Universities Act* yang memungkinkan lembaga pemerintah untuk membatasi bahkan membatalkan pendanaan federal bagi universitas yang bermitra dengan perusahaan luar. Rancangan undang-undang tersebut diperkenalkan pada tanggal 18 Februari 2021 yang selisih 18 hari setelah presiden Donald Trump tidak menjabat lagi sebagai presiden Amerika Serikat. Isi dari Rancangan Undang-Undang tersebut membatasi keterlibatan mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari negara tertentu termasuk Rusia dan China untuk ikut serta dalam proyek penelitian yang sensitif serta melarang penggunaan teknologi tertentu dalam pelaksanaannya. Kecuali mahasiswa tersebut telah memiliki izin dari Kantor Direktur Intelijen Nasional. Larangan penggunaan teknologi tersebut mencakup aktor bisnis yang terdapat pada daftar entitas termasuk Huawei dan juga ZTE Corporation.



**Gambar 2.1** Jumlah kumulatif paten jaringan 5G berdasarkan merk (Sumber: <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-huawei-threat-us-national-security>)



**Gambar 2.2** Peta persebaran Huawei per Februari 2023 (Sumber: <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-huawei-threat-us-national-security>)